

ANALISIS KESENJANGAN DAN STRATEGI SOLUSI DALAM MENGHADAPI KRISIS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Suryadi Mikael¹, Mathilda Sunta², Haikal Aprilianza³, Rachmah Ayu Safitri⁴, Dr.
Yulius Yohanes, M.Si⁵

¹Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

²Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

³Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

⁴Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

⁵Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

Alamat e-mail : 1suryadimikael79@gmail.com, Alamat e-mail :

2mathildasunta15@gmail.com, Alamat e-mail : 3haikalaprilianza@gmail.com

,Alamat e-mail : 4Ayusafitri210683@gmail.com, Alamat e-mail :

5yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian education system is facing a significant crisis that hinders national development and equity. This study identifies the root causes of the education crisis, including infrastructure disparity, unequal access, curriculum irrelevance, and teacher competency issues. By reviewing relevant literature and national data, this paper proposes a multi-sectoral strategy to resolve educational inequality and improve quality. This research finds that a decentralized education policy combined with focused investment in rural education infrastructure, digital learning platforms, and teacher capacity building programs could create a more equitable and effective education system. The paper concludes by recommending policy reforms and future research directions.

Keywords: education crisis, inequality, Indonesia, teacher competency, education reform

ABSTRAK

Sistem pendidikan Indonesia sedang menghadapi krisis serius yang menghambat pembangunan nasional dan keadilan sosial. Kata Kunci: krisis pendidikan, ketimpangan, Indonesia, kompetensi guru, reformasi pendidikan, akses yang tidak merata, ketidaksesuaian kurikulum, dan permasalahan kompetensi guru. Dengan meninjau literatur yang relevan dan data nasional, artikel ini mengusulkan strategi multisektoral untuk mengatasi ketimpangan pendidikan dan meningkatkan kualitasnya. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pendidikan yang terdesentralisasi, disertai dengan investasi terfokus pada infrastruktur pendidikan di daerah, platform pembelajaran digital, dan program peningkatan kapasitas guru, dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan efektif. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi reformasi kebijakan dan arah penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: krisis pendidikan, ketimpangan, Indonesia, kompetensi guru, reformasi pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Namun, Indonesia saat ini tengah mengalami krisis pendidikan yang cukup kompleks, ditandai dengan rendahnya mutu, ketimpangan akses, dan lemahnya kapasitas sumber daya pendidik. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun hasilnya belum optimal. Beberapa studi menyoroti bahwa permasalahan utama justru terletak pada ketimpangan distribusi infrastruktur pendidikan, kualitas tenaga pendidik yang rendah di daerah tertinggal, hingga sistem kurikulum yang belum mampu menjawab tantangan zaman.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengungkap bahwa meskipun pemerintah telah melakukan banyak intervensi melalui program seperti Merdeka Belajar dan digitalisasi sekolah, hasilnya belum merata. Banyak sekolah, terutama di

wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), masih kekurangan fasilitas, akses internet, dan guru berkualitas. Globalisasi turut memperparah keadaan melalui infiltrasi budaya luar dan penggunaan teknologi tanpa filter karakter.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka sebagai metode utama. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga resmi seperti UNESCO, BPS, Kemdikbudristek, serta publikasi NGO yang relevan dengan isu pendidikan di Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola krisis yang berulang dan potensi solusi berkelanjutan yang telah diusulkan atau diterapkan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber literatur dan konfirmasi silang antar data statistik dan temuan kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa krisis pendidikan di Indonesia mencakup empat dimensi utama, yaitu: (1) ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan; (2) rendahnya kompetensi guru di daerah 3T; (3) kurikulum yang belum kontekstual dan relevan dengan kebutuhan lokal maupun global; dan (4) lemahnya budaya literasi dan numerasi pada siswa. Studi dari World Bank (2020) dan OECD (2018) menegaskan bahwa learning poverty di Indonesia mencapai lebih dari 50% pada anak usia 10 tahun, artinya lebih dari separuh anak tidak dapat memahami teks sederhana.

Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah menurun drastis di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Selain itu, kualitas pengajaran di daerah pedesaan jauh di bawah standar nasional. Ketimpangan ini bukan hanya masalah geografis, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan struktural dalam distribusi sumber daya pendidikan.

Tabel 1 Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan

Provinsi	Jumlah Sekolah	Akses Internet (%)	Guru Berkualifikasi S1 (%)
DKI Jakarta	5.238	98%	96%
Papua	3.114	34%	61%
Jawa Barat	25.624	87%	85%
NTT	4.912	41%	68%
Sumatera Utara	10.087	76%	73%

Data tersebut menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara daerah maju seperti DKI Jakarta dengan wilayah tertinggal seperti Papua dan NTT. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa yang berbeda secara signifikan antar daerah.

Menurut Kemendikbudristek (2022), lebih dari 50% guru Indonesia tidak memenuhi standar kompetensi pedagogik yang memadai. Banyak guru masih menggunakan metode ceramah, minim pendekatan kontekstual, serta belum menguasai teknologi pembelajaran. Sertifikasi guru belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas pengajaran.

Kurikulum nasional saat ini masih cenderung berbasis hafalan

dan tidak membangun daya nalar kritis siswa. Selain itu, pelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa di daerah masing-masing, mengabaikan aspek sosial-budaya lokal yang seharusnya menjadi kekuatan.

Meski konstitusi menetapkan 20% APBN untuk pendidikan, kenyataannya distribusi anggaran belum efisien. Banyak anggaran terserap untuk biaya birokrasi daripada peningkatan kualitas layanan langsung. Daerah-daerah miskin masih kekurangan guru, sarana, dan bahan ajar yang layak.

Beberapa inisiatif telah dilakukan pemerintah, seperti Program Merdeka Belajar dan Digitalisasi Sekolah. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan ketimpangan kesiapan infrastruktur TIK dan rendahnya literasi digital guru. Sementara itu, negara-negara seperti Vietnam dan Estonia berhasil meningkatkan performa pendidikan dengan mengutamakan pelatihan guru berbasis praktik dan pemberdayaan komunitas sekolah. Indonesia dapat meniru pendekatan ini melalui kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.

Solusi terhadap krisis ini tidak bisa bersifat kosmetik. Diperlukan perubahan paradigma dari “pendidikan untuk semua” menjadi “pendidikan yang adil untuk semua”. Ini berarti kurikulum berbasis lokalitas, kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penggunaan teknologi digital secara adaptif dan inklusif, serta transparansi anggaran dan akuntabilitas publik.

Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan pendidikan secara lebih sistematis, dibutuhkan dukungan teknologi berupa decision support system (DSS). Sistem ini dapat membantu pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan berbasis data mikro, seperti pemetaan kebutuhan guru di wilayah 3T, alokasi anggaran pendidikan berbasis ketimpangan akses, dan prioritas pembangunan infrastruktur sekolah. DSS ini dapat berbentuk dashboard digital yang mengintegrasikan data dari BPS, Kemendikbudristek, dan hasil asesmen nasional, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan berbasis fakta.

E. Kesimpulan

Krisis pendidikan di Indonesia merupakan isu multidimensional yang membutuhkan intervensi sistemik dan berkelanjutan. Ketimpangan akses, kualitas pengajar, dan ketidaksesuaian kurikulum menjadi akar masalah utama. Oleh karena itu, reformasi kebijakan pendidikan harus diarahkan pada desentralisasi pengelolaan pendidikan, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, serta investasi pada infrastruktur pendidikan berbasis komunitas. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji efektivitas kebijakan pendidikan yang berbasis data mikro dan pendekatan lokal partisipatif.

Menghadapi kompleksitas krisis pendidikan di Indonesia, perlu dirancang strategi komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik, tetapi juga transformasi paradigma pendidikan. Salah satu pendekatan adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran berbasis komunitas. Pemerintah dapat menggandeng sektor swasta dan LSM untuk membangun pusat-pusat belajar digital di desa yang dapat diakses oleh siswa, guru, dan masyarakat. Selain

itu, perlu adanya reformasi kebijakan terkait rekrutmen dan distribusi guru. Skema insentif berbasis daerah prioritas harus diperkuat, serta dilakukan monitoring berbasis data terhadap kinerja guru melalui platform digital.

Pendidikan karakter juga harus diprioritaskan dalam kurikulum nasional, terutama dalam menyikapi dampak negatif globalisasi. Materi pembelajaran hendaknya menekankan nilai-nilai kearifan lokal, nasionalisme, dan toleransi. Penerapan sistem pendidikan *hybrid* (campuran daring dan luring) perlu terus dikembangkan, dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan pelatihan intensif bagi tenaga pendidik. Di samping itu, kebijakan afirmatif yang menargetkan kelompok masyarakat rentan perlu dipertajam. Program bantuan pendidikan, beasiswa bagi siswa miskin, serta subsidi teknologi untuk keluarga prasejahtera dapat menjadi langkah konkret dalam mengurangi kesenjangan.

Dengan strategi yang berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada pemerataan, Indonesia dapat keluar dari krisis pendidikan dan

menciptakan generasi muda yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing global

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Darmaningtyas. (2021). Komersialisasi pendidikan dan masa depan anak Indonesia. Jakarta: INSISTPress.
- Sahlberg, P. (2011). *Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland?* New York: Teachers College Press.
- World Bank. (2014). *Teacher reform in Indonesia*. Washington, DC: World Bank Group.

Jurnal :

- Firman, F., & Tola, B. (2008). *The future of schooling in Indonesia*. *Journal of International Cooperation in Education*, 11(1), 71–84.
- Suryadi, A. (2000). Pendidikan nasional dalam era globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(3), 287–298.
- Tan, C. (2018). *Comparing high-performing education systems in Asia: Singapore, Shanghai, and Vietnam*. *Asia Pacific Journal of Education*, 38(3), 377–393.
- Khoiru, R. (2022). Problematika pendidikan di masa pandemi. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 12(2), 145–159.
- Slamet, S. Y. (2016). Persepsi guru terhadap Kurikulum 2013. *Jurnal*

Pendidikan dan Kebudayaan, 22(3), 345–357.

- Yunus, A., & Susanto, H. (2020). Pendidikan digital dan peran guru di era 4.0. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(1), 10–21.
- Puspitasari, I. (2021). Literasi digital guru sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Guru*, 8(2), 120–129.
- Murniati, C. T. (2020). Persepsi orang tua terhadap pendidikan di masa pandemi. *Jurnal Kependidikan*, 18(3), 200–212.

Laporan/Institusi (Pemerintah & Organisasi Internasional):

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik pendidikan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Kemendikbudristek. (2021). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jakarta: Kemendikbud. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id>
- World Bank. (2020). *Indonesia economic prospects, June 2020: The long road to recovery*. Washington, DC: World Bank Group.
- OECD. (2018). *PISA 2018 results: What students know and can do*. Paris: OECD Publishing.
- UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021: Non-state actors in education*. Paris: UNESCO.
- UNICEF. (2020). *Learning during the COVID-19 pandemic: What do we know from the Asia and Pacific region?* Retrieved from <https://www.unicef.org>

Rosser, A. (2018). *Beyond access: Making Indonesia's education system work*. Sydney: Lowy Institute. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org>

Nugroho, D., Pasadilla, B., Habibie, I., Laksani, D., & Rahardini, P. (2020). *Education policy responses across Indonesia in the context of COVID-19*. *The Education and Development Forum*.

Sumber Berita:

Kompas. (2022, November 23). *Krisis guru di daerah 3T*. Kompas. Retrieved from <https://www.kompas.com>